

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	5
---	---	---	---



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

SUBBAGIAN HUMAS

Kompas	Media Ind	Tempo	Sindo
Indo Pos	Pos Kota	Warta Kota	

Serapan Anggaran DKI Masih Jeblok

Pegawai ketakutan karena bekerja di bawah ancaman.

Erwan Hermawan

erwan.hermawan@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali menuding anak buahnya bekerja lamban sehingga penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 rendah. Dari total anggaran Rp 69,2 triliun, hingga bulan ini serapan anggaran baru terealisasi sekitar 20 persen.

Basuki heran ihwal pegawai pemerintah yang tak mampu membelanjakan anggaran tersebut. Padahal, kata dia, mereka cukup membeli, misalnya, alat berat dan kebutuhan lainnya di e-katalog, milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berkaca dari kasus pemungutan upah pekerja harian lepas Dinas Kebersihan, Basuki menduga jebloknya serapan karena ulah pegawainya untuk memainkan anggaran. "Berarti ada unsur komisi," kata dia di Rumah Sakit Tarakan, kemarin.

Salah satu anggaran yang tidak terealisasi adalah pembelian lahan untuk taman. Basuki menilai Dinas Pertamanan dan Pemakaman tak mampu menjalankan tugasnya. Sebab, dari Rp 3,5 triliun untuk pengadaan lahan taman, tak sepersen pun Dinas merealisasinya.

Bahkan Basuki mengancam akan mencopot jabatan anak buahnya yang secara sengaja memperlambat penyerapan anggaran. Seperti yang dilaku-

kannya pada Jumat pekan lalu dengan melantik 327 pejabat baru di lingkungan pemerintah Jakarta.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika, perombakan ini karena kinerja pejabat lama buruk. Ia mencontohkan ada satuan kerja perangkat daerah yang diberi target tapi tak terealisasi, termasuk soal serapan anggaran.

Ratna Dyah Kurniati, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, membantah jika disebut tak membeli lahan untuk taman. "Sedang dilelang," ucap dia. Beberapa lahan, ujar dia, sertifikatnya sedang diurus di Badan Pertanahan Nasional.

Ia mengatakan tak mudah membeli tanah di Jakarta. Beberapa kasus pernah terjadi, misalnya, pemilik sudah setuju namun dokumennya tak lengkap. "Kadang sudah beli, tapi luasnya tidak sama ketika diukur lagi."

Ratna mengklaim Dinas sudah berupaya membeli tanah seluas-luasnya di Ibu Kota dan mempertimbangkan ketaatan hukum. "Kami sudah cepat dalam negosiasi," katanya. Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Prabowo Soenirman, mengatakan minimnya serapan anggaran bukan karena pegawai tidak mau membelanjakannya. "Pegawai pada ketakutan, kalau kerja di bawah ancaman," ucapnya. Basuki, ujar Prabowo, kerap mengancam anak buahnya akan melaporkan

ke aparat hukum jika diduga melakukan korupsi, dan pemecatan jika kinerjanya buruk. Menurut dia, budaya seperti ini tak bagus untuk bekerja.

● VINDRY FLORENTINE

Minim Serapan

SERAPAN anggaran pemerintah Jakarta kembali jeblok. Sama seperti tahun lalu yang hanya terserap 40 persen, hingga Agustus kemarin pemerintah baru membelanjakan dana APBD sebesar Rp 12,2 triliun atau 19 persen.

REALISASI APBD HINGGA AGUSTUS 2015

	Target (triliun)	Realisasi (triliun)
PENDAPATAN		
Pendapatan asli daerah	Rp 40,4	Rp 17,1
Dana perimbangan	Rp 15,5	Rp 5,2
Pendapatan lain-lain	Rp 4,6	Rp 7,3
BELANJA		
Belanja Operasional		
Belanja pegawai	Rp 21,1	Rp 6,1
Belanja barang	Rp 16,6	Rp 3,8
Belanja hibah	Rp 1,7	Rp 0,8
Belanja bantuan sosial	Rp 2,3	Rp 0,9
Belanja subsidi	Rp 0,94	
Belanja bantuan keuangan	Rp 0,4	
Belanja Modal		
Belanja tanah	Rp 5,4	Rp 0,06
Belanja peralatan dan mesin	Rp 3,1	Rp 0,05
Belanja gedung dan bangunan	Rp 5,3	Rp 0,2
Belanja irigasi dan jalan	Rp 6,4	Rp 0,2
Belanja aset tetap dan lainnya	Rp 0,11	Rp 0,03